

**PEMBERDAYAAN ANAK JALANAN OLEH LEMBAGA SWADAYA  
MASYARAKAT DI KOTA PALEMBANG PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Daffa Fawwazi Fadhlurrohman

NPP. 32.0211

*Asdaf Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan*

*Program Studi Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat*

Email: [plgdaffa123@gmail.com](mailto:plgdaffa123@gmail.com)

Pembimbing Skripsi: Drs. Akhmad Marzuki, M.Si

**ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP):** *Street children in Palembang represent a complex social issue driven by poverty, limited access to education, and family dysfunction. The limited reach of government programs highlights the strategic role of Non-Governmental Organizations (NGOs) in empowering this vulnerable group. Purpose:* This research aims to identify the role of Non-Governmental Organizations (NGOs) in empowering street children in Palembang, to explore the supporting and inhibiting factors, and to analyze the efforts made to overcome those challenges. **Method:** *This study uses a qualitative approach with data collection techniques including interviews, observation, and documentation. Informants consist of representatives from the Social Affairs Office, NGO leaders, human rights activists, community members, and street children themselves. Data analysis techniques include data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Result:* The results of the study indicate that NGOs have a strategic role in five aspects of empowerment, namely: providing a supportive environment (enabling), increasing capacity (strengthening), protection, emotional and social support (support), and ongoing maintenance. Supporting factors come from cross-sectoral cooperation, while obstacles include limited funds, low community participation, and social stigma against street children. In conclusion, empowering street children requires a comprehensive, collaborative, and sustainable approach. **Conclusion:** *The role of NGOs is very important in bridging the needs of street children with social programs, especially in aspects of education, skills, and psychosocial support.*

**Keywords:** *Street Children, Empowerment, Non-Governmental Organization, Palembang City*

**ABSTRAK**

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Anak jalanan di Kota Palembang mencerminkan persoalan sosial kompleks yang dipicu oleh kemiskinan, keterbatasan akses pendidikan, dan disfungsi keluarga. Minimnya daya jangkau program pemerintah mendorong peran strategis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam upaya pemberdayaan kelompok rentan ini. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam melaksanakan pemberdayaan anak jalanan di Kota Palembang, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya, serta menganalisis upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan

dalam penelitian ini terdiri dari perwakilan Dinas Sosial, pengurus LSM, aktivis HAM, masyarakat, serta anak jalanan itu sendiri. Teknik analisis data mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa LSM memiliki peran strategis dalam lima aspek pemberdayaan yaitu: penyediaan lingkungan yang mendukung (pemungkinan), peningkatan kapasitas (penguatan), perlindungan, dukungan emosional dan sosial (penyokongan), serta pemeliharaan berkelanjutan. Faktor pendukung berasal dari kerja sama lintas sektor, sedangkan hambatannya meliputi keterbatasan dana, rendahnya partisipasi masyarakat, dan stigma sosial terhadap anak jalanan. Kesimpulannya, pemberdayaan anak jalanan memerlukan pendekatan yang menyeluruh, kolaboratif, dan berkelanjutan. **Kesimpulan:** Peran LSM sangat penting dalam menjembatani kebutuhan anak jalanan dengan program sosial, terutama dalam aspek pendidikan, keterampilan, dan dukungan psikososial.

**Kata kunci:** Anak Jalanan, Pemberdayaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Kota Palembang

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan nasional diarahkan untuk memperbaiki kualitas hidup manusia melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta respons terhadap perkembangan global (Qomariyah dkk., 2023). Namun demikian, kemiskinan masih menjadi permasalahan utama yang kompleks. Kemiskinan tidak hanya berimplikasi pada kurangnya kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga menjadi akar dari berbagai masalah sosial lainnya, termasuk munculnya fenomena anak jalanan (Santoso dkk., 2023).

Anak jalanan merupakan manifestasi nyata dari ketimpangan sosial yang terjadi di kota-kota besar seperti Palembang. Bhukuth & Jerome (2015) menyatakan bahwa anak-anak turun ke jalan bukan hanya karena faktor ekonomi, tetapi juga akibat dari runtuhnya struktur sosial yang semestinya melindungi mereka. Mereka hidup dalam kondisi yang memprihatinkan tanpa akses memadai terhadap pendidikan, kesehatan, maupun perlindungan sosial. Tekanan ekonomi, disfungsi keluarga, dan keterbatasan layanan pemerintah menjadi faktor utama yang memaksa anak-anak turun ke jalan (Rempe dkk., 2023; Bimantara & Dharmawan, 2021). Berdasarkan data Dinas Sosial Kota Palembang tahun 2023, jumlah anak jalanan terus meningkat, dengan total 155 anak tercatat pada tahun 2022.

Dalam kondisi keterbatasan jangkauan program pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) memegang peran penting dalam proses pemberdayaan anak jalanan. LSM hadir sebagai aktor yang menjembatani kebutuhan anak-anak jalanan dengan layanan pendidikan, pelatihan keterampilan, hingga dukungan psikososial (Alfian dkk., 2023). Tidak hanya bersifat fisik, pemberdayaan yang diberikan LSM juga menyentuh aspek emosional dan sosial yang bertujuan untuk menciptakan kemandirian dan meningkatkan kesejahteraan anak jalanan secara berkelanjutan (Rahmadana dkk., 2023).

Pemberdayaan yang dilakukan LSM di Kota Palembang mencakup berbagai pendekatan, seperti penyediaan pendidikan informal, pelatihan keterampilan menjahit dan teknologi informasi, serta layanan konseling psikologis (Putri dkk., 2024). Program-program tersebut dirancang untuk membantu anak jalanan memperoleh keterampilan dasar, meningkatkan rasa percaya diri, dan memiliki peluang yang lebih baik dalam menjalani kehidupan di masa depan.

Dalam jangka panjang, strategi ini diharapkan mampu menekan angka anak jalanan melalui penguatan kapasitas individu.

Selain aspek teknis, LSM juga aktif dalam upaya advokasi kepada pemerintah daerah untuk mendorong kebijakan yang lebih inklusif dan berpihak pada anak jalanan (Babuno dkk., 2024). Melalui kerja sama lintas sektor dengan pemerintah, lembaga internasional, dan masyarakat, LSM memperluas dampak program pemberdayaan agar lebih menyeluruh dan berkelanjutan (Ariska dkk., 2021). Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana peran LSM berkontribusi terhadap proses pemberdayaan anak jalanan di Kota Palembang sebagai bagian dari solusi sosial yang berkelanjutan.

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Permasalahan anak jalanan di Indonesia, khususnya di Kota Palembang, mencerminkan kondisi sosial yang kompleks dan multidimensional. Keberadaan mereka merupakan dampak dari berbagai persoalan struktural seperti kemiskinan, ketimpangan akses pendidikan, disfungsi keluarga, serta minimnya intervensi sosial yang efektif dari pemerintah. Meskipun pemerintah telah mencanangkan program kesejahteraan sosial, daya jangkauannya masih terbatas dalam merangkul kelompok rentan seperti anak jalanan. Dalam kondisi seperti ini, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) hadir sebagai aktor non-pemerintah yang menjalankan fungsi pemberdayaan melalui pendekatan komunitas, dengan harapan mampu memberikan perubahan nyata dan berkelanjutan bagi anak-anak yang hidup di jalanan. Menurut Hamdi (2014), dalam konteks kebijakan publik, partisipasi masyarakat dan organisasi non-pemerintah merupakan bentuk nyata dari demokratisasi pembangunan sosial.

Rumusan masalah dalam penelitian ini berangkat dari kebutuhan untuk menelaah secara lebih dalam peran LSM dalam melaksanakan pemberdayaan anak jalanan di Kota Palembang. Secara khusus, penelitian ini berusaha menjawab tiga hal pokok, yaitu bagaimana peran LSM dalam pemberdayaan anak jalanan, apa saja faktor pendukung dan penghambat yang mereka hadapi dalam proses pemberdayaan tersebut, serta bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Fokus terhadap peran LSM menjadi penting karena mereka kerap kali menjadi garda terdepan dalam menjangkau anak jalanan yang tidak terdata oleh sistem formal pemerintah. Peran ini mencakup aspek pendidikan informal, pelatihan keterampilan, dukungan psikososial, serta perlindungan sosial yang sering kali tidak tersentuh oleh program-program konvensional.

Meskipun demikian, tinjauan terhadap penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kajian mengenai anak jalanan umumnya masih bersifat umum dan belum banyak yang menelaah secara spesifik peran strategis LSM dalam pemberdayaan anak jalanan dengan pendekatan yang komprehensif. Beberapa penelitian seperti yang dilakukan oleh Ayun dkk. (2023), Daini & Arif (2023), maupun Babuno dkk. (2024), lebih menyoroti aspek partisipasi relawan atau dukungan komunitas, namun belum menjelaskan secara rinci strategi pemberdayaan jangka panjang serta bentuk kolaborasi lintas sektor yang dibangun oleh LSM. Ketiadaan pembahasan yang mendalam terkait dimensi pemberdayaan seperti yang dijelaskan oleh Suharto (2010), yakni pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan, menjadi celah yang belum banyak dijawab oleh penelitian terdahulu.

Kesenjangan inilah yang melatarbelakangi pentingnya penelitian ini dilakukan. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan kajian mengenai bagaimana LSM di Kota Palembang secara konkret melaksanakan pemberdayaan anak jalanan dengan pendekatan lima dimensi pemberdayaan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperlihatkan bagaimana tantangan struktural dan sosial diatasi melalui kerja sama antara LSM, pemerintah, dan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga memberikan kontribusi dalam merumuskan strategi pemberdayaan sosial yang aplikatif dan dapat direplikasi di daerah lain dengan karakteristik sosial yang serupa.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu memberikan dasar penting untuk memahami peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam pemberdayaan anak jalanan. Ayun dkk. (2023) menunjukkan bahwa partisipasi volunteer dalam kegiatan sosial yang dilakukan oleh LSM berkontribusi pada pelaksanaan program, pengambilan keputusan, hingga pemanfaatan hasil oleh relawan. Namun, penelitian ini lebih terfokus pada aspek relawan daripada strategi pemberdayaan yang menysasar langsung anak jalanan sebagai subjek perubahan sosial.

Penelitian yang dilakukan oleh Daini & Arif (2023) memperlihatkan bahwa komunitas lokal seperti Omah Dhuafa telah menjalankan peran pemberdayaan dengan pendekatan berbasis komunitas. Mereka memberikan pendidikan informal dan pelatihan keterampilan, namun penelitian ini menemukan adanya kendala dalam menjalin kerja sama dengan pemerintah serta keterbatasan dalam pengembangan program. Penekanan dalam penelitian ini masih terbatas pada dukungan komunitas tanpa mengelaborasi sistem pemberdayaan yang lebih komprehensif.

Kajian yang dilakukan Babuno dkk. (2024) mengangkat kontribusi organisasi internasional melalui platform pendanaan terhadap yayasan sosial di Yogyakarta. Dalam penelitian tersebut, LSM berperan dalam pengelolaan dana hibah untuk penyediaan fasilitas pendidikan dan asrama anak jalanan. Meski berhasil mendukung pemenuhan hak dasar anak, penelitian ini belum membahas dimensi pemberdayaan secara menyeluruh, khususnya dalam aspek perlindungan dan keberlanjutan sosial.

Penelitian oleh Rahman (2024) membahas pelaksanaan program pendidikan informal oleh LSM yang berfokus pada pembinaan karakter dan bimbingan moral terhadap anak jalanan di Jakarta Barat. Program ini menggunakan pendekatan persuasif dan partisipatif, namun dihadapkan pada tantangan inkonsistensi partisipasi serta keterbatasan sumber daya manusia dan finansial. Penelitian ini memberi kontribusi dalam aspek pendidikan, tetapi belum menelusuri secara dalam peran LSM dalam konteks pemberdayaan sosial yang terintegrasi.

Sementara itu, Pratama dkk. (2025) mengembangkan model strategi keberfungsian sosial anak jalanan melalui pendekatan komunitas dan pelibatan keluarga. Penelitian ini menunjukkan pentingnya jejaring sosial lokal dan integrasi anak dalam lingkungan sekitarnya sebagai bentuk pemberdayaan. Meskipun demikian, fokus utama kajian tersebut lebih tertuju pada fungsi sosial anak, bukan pada peran spesifik LSM dalam pelaksanaan strategi pemberdayaan berbasis multidimensi. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menelaah secara mendalam peran LSM dalam pemberdayaan anak jalanan di Kota Palembang berdasarkan lima dimensi pemberdayaan menurut Suharto (2010), yaitu pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan.

### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah yang terletak pada fokus, pendekatan teoritis, serta konteks lokasi yang belum banyak diangkat dalam penelitian terdahulu. Jika sebagian besar penelitian sebelumnya hanya menyoroti partisipasi relawan (Ayun dkk., 2023), peran komunitas lokal (Daini & Arif, 2023), dukungan internasional melalui platform pendanaan (Babuno dkk., 2024), atau pelaksanaan pendidikan informal dan keberfungsian sosial anak (Rahman, 2024; Pratama dkk., 2025), maka penelitian ini hadir dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan terstruktur, yaitu menggunakan lima dimensi pemberdayaan dari Suharto (2010): pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan.

Kebaruan lain dari penelitian ini adalah konteks lokasi penelitian yang berfokus pada Kota Palembang, yang secara khusus belum banyak dijadikan lokasi studi dalam isu pemberdayaan anak jalanan oleh LSM. Penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak dilakukan di kota-kota besar seperti Jakarta, Yogyakarta, Bandung, maupun Malang, sehingga

karakteristik sosial-budaya serta pola intervensi lokal oleh LSM di Palembang belum terpetakan secara mendalam dalam kajian akademik.

Perbedaan mendasar penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya juga terletak pada sudut pandang dan metode analisis yang digunakan. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan kegiatan pemberdayaan, tetapi juga menganalisis secara sistematis peran LSM dengan mengacu pada kerangka kerja teoritis yang kuat, meliputi penguatan kapasitas, advokasi perlindungan, dan kesinambungan intervensi sosial. Selain itu, penelitian ini mengkaji hubungan antara LSM, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam pola kolaboratif yang bertujuan menciptakan pemberdayaan yang berkelanjutan.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah baru dalam pengembangan studi pemberdayaan anak jalanan, baik dari aspek teoritis maupun praktik lapangan. Penelitian ini tidak hanya memperluas cakupan geografis kajian, tetapi juga memperdalam pemahaman tentang peran strategis LSM dalam menciptakan perubahan sosial di tingkat lokal secara holistik dan terukur.

### **1.5. Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam melaksanakan pemberdayaan anak jalanan di Kota Palembang, dengan menelaah dimensi-dimensi utama pemberdayaan yang mencakup pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memahami bagaimana LSM merespons berbagai tantangan dan hambatan dalam proses pemberdayaan, serta mengidentifikasi strategi yang digunakan untuk menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan bagi anak-anak jalanan di wilayah tersebut.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan secara mendalam dan menyeluruh fenomena sosial yang kompleks, seperti dinamika peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam memberdayakan anak jalanan. Sejalan dengan Nurdin & Hartati (2018), pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami makna tindakan sosial secara kontekstual dan mendalam dari perspektif pelaku. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memahami makna di balik tindakan sosial para pelaku secara kontekstual, bukan sekadar mengukur fenomena secara kuantitatif. Pendekatan kualitatif dianggap paling tepat untuk mengeksplorasi berbagai aspek pemberdayaan, mulai dari strategi hingga hambatan yang dihadapi LSM dalam praktik lapangan.

Penelitian ini dilakukan di Kota Palembang pada tanggal 5 hingga 26 Januari 2025, dengan lokasi utama penelitian adalah di wilayah kerja LSM dan titik-titik aktivitas anak jalanan seperti kawasan pasar, taman kota, dan perempatan jalan. Informan dalam penelitian ini dipilih secara purposive, yaitu individu yang memiliki relevansi dan pengetahuan terhadap fokus penelitian. Informan kunci terdiri dari Kepala Dinas Sosial Kota Palembang, pengurus LSM yang aktif dalam program pemberdayaan anak jalanan, aktivis hak anak, perwakilan masyarakat, serta anak jalanan itu sendiri. Pemilihan informan kunci ini dilakukan karena mereka terlibat langsung, baik sebagai pelaksana maupun penerima dampak dari kegiatan pemberdayaan yang diteliti. Simangunsong (2019) menekankan bahwa validitas dalam penelitian pemerintahan kualitatif dapat diperkuat melalui triangulasi data dan keterlibatan langsung peneliti di lapangan.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan panduan semi-terstruktur, observasi langsung di lapangan, dan dokumentasi dari berbagai sumber sekunder seperti laporan kegiatan dan arsip program. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah

peneliti sendiri, dengan pedoman wawancara sebagai alat bantu. Untuk memastikan validitas data, teknik triangulasi digunakan dengan membandingkan hasil dari berbagai sumber informasi. Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis ini dilakukan secara berkelanjutan selama penelitian berlangsung agar hasil yang diperoleh benar-benar merefleksikan realitas sosial di lapangan. Sugiyono (2019) menjelaskan bahwa proses reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan merupakan langkah utama dalam analisis data kualitatif yang bersifat siklis dan terus-menerus.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian dan pembahasan berisi tentang informasi yang berkaitan dengan kondisi yang peneliti amati ketika penelitian dilaksanakan. Pada penelitian ini peneliti lebih fokus dengan Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Pemberdayaan Anak Jalanan Di Kota Palembang.

#### **3.1. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Melaksanakan Pemberdayaan Anak Jalanan di Kota Palembang**

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) memiliki peran strategis dalam melaksanakan program pemberdayaan anak jalanan di Kota Palembang melalui pendekatan yang berorientasi pada pendidikan, peningkatan keterampilan, dan perlindungan sosial. LSM menyediakan akses pendidikan nonformal bagi anak-anak yang terpinggirkan dari sistem sekolah formal, seperti melalui program kejar paket dan bimbingan belajar yang dilaksanakan langsung di titik-titik kumpul mereka. Selain pendidikan, LSM juga menyelenggarakan pelatihan keterampilan kerja seperti kerajinan tangan, kuliner, dan keterampilan teknis lainnya guna meningkatkan potensi ekonomi anak jalanan. Program ini tidak hanya meningkatkan kapasitas individu, tetapi juga mendorong kesadaran anak akan hak-hak mereka serta memberikan perlindungan dari berbagai bentuk eksploitasi dan kekerasan. Dalam menganalisis peran tersebut, penulis menggunakan teori pemberdayaan dari Suharto (2010) yang mencakup lima dimensi utama, yaitu pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan, sebagai kerangka untuk memahami kontribusi LSM dalam menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan bagi anak jalanan.

##### **a. Pemungkinan**

Dimensi pemungkinan dalam konteks pemberdayaan anak jalanan merujuk pada penciptaan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka secara optimal. Lingkungan yang dimaksud tidak hanya mencakup kondisi fisik yang layak, tetapi juga suasana sosial dan psikologis yang aman, stabil, serta mampu memenuhi kebutuhan dasar anak. Teori Suharto (2010) menekankan bahwa pemungkinan adalah proses menyediakan prasyarat agar seseorang dapat berkembang sesuai potensinya, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan. Dalam konteks anak jalanan, dimensi ini sangat penting mengingat mereka rentan terhadap pengabaian, kekerasan, dan eksploitasi.

Pemerintah Kota Palembang, melalui Dinas Sosial, menunjukkan komitmen dalam menciptakan lingkungan yang lebih ramah anak. Upaya ini tercermin dalam penyediaan berbagai fasilitas umum seperti taman bermain, ruang terbuka hijau, pusat kesehatan anak, sekolah ramah anak, dan rumah singgah. Fasilitas-fasilitas ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat aktivitas fisik dan sosial, tetapi juga sebagai ruang perlindungan dan pemenuhan hak anak. Berdasarkan data dari Dinas Sosial tahun 2025, terdapat 15 taman bermain anak, 25 ruang terbuka hijau, dan 20 sekolah ramah anak yang tersebar

di berbagai wilayah Kota Palembang. Penyediaan fasilitas ini menjadi wujud nyata pemungkinan dari sisi lingkungan fisik dan aksesibilitas layanan dasar.

Wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Kota Palembang, Bapak M. Ichsanul Akmal, memperkuat pemahaman mengenai pentingnya menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan mendukung kebutuhan anak. Beliau menegaskan bahwa tempat tinggal yang layak, sanitasi yang memadai, serta ruang publik yang aman adalah komponen vital untuk mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Selain itu, fasilitas pendidikan dan kesehatan yang mudah dijangkau menjadi sarana penting dalam memastikan anak-anak memiliki akses terhadap hak-haknya secara utuh. Pandangan ini menunjukkan bahwa dimensi pemungkinan tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan dimensi lain seperti perlindungan dan penguatan.

Dukungan dari masyarakat sipil juga menjadi bagian penting dari dimensi pemungkinan. Aktivistis HAM Bapak Supriyadi menyoroti pentingnya lingkungan sosial dan emosional yang stabil dalam membentuk kepribadian dan mental anak. Menurutnya, lingkungan yang mendukung bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga jaminan terhadap pemenuhan hak kasih sayang, rasa aman, perlindungan dari diskriminasi, serta kesempatan untuk berekspresi dan berkembang sesuai potensinya. Ia juga menekankan bahwa pendidikan yang berkualitas dan layanan kesehatan yang memadai harus dijamin oleh negara, termasuk melalui intervensi kebijakan seperti layanan kesehatan gratis dan bantuan gizi bagi keluarga kurang mampu.

Secara keseluruhan, dimensi pemungkinan dalam konteks pemberdayaan anak jalanan mencakup pemenuhan kebutuhan fisik, sosial, emosional, dan intelektual anak melalui lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung. Peran pemerintah, LSM, keluarga, dan masyarakat harus bersinergi dalam menciptakan ruang hidup yang kondusif bagi anak-anak. Tanpa adanya pemungkinan yang kuat, maka proses pemberdayaan tidak dapat berjalan optimal karena anak tidak memiliki fondasi dasar untuk berkembang. Oleh karena itu, dimensi ini menjadi titik awal penting dalam proses pemberdayaan sosial, khususnya bagi anak-anak yang hidup dalam kondisi rentan seperti anak jalanan. Yusuf & Tsagem (2022) menegaskan bahwa pendidikan non-formal dan layanan konseling memiliki potensi besar dalam memberdayakan anak jalanan karena mampu menciptakan ruang aman dan membangun fondasi psikologis yang sehat.

## **b. Penguatan**

Dimensi penguatan dalam konteks pemberdayaan anak jalanan merujuk pada upaya meningkatkan kapasitas, keterampilan, dan kepercayaan diri individu maupun komunitas agar mereka mampu mandiri dan berdaya saing secara sosial dan ekonomi. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kota Palembang telah berperan aktif dalam menyelenggarakan berbagai pelatihan keterampilan, seperti menjahit, tata boga, pertanian organik, kerajinan tangan, hingga pemanfaatan teknologi digital. Selain pelatihan teknis, program juga mencakup edukasi mengenai manajemen usaha, strategi pemasaran, serta akses terhadap modal usaha. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kemampuan individu, tetapi juga membangun jejaring sosial antar peserta agar mereka dapat saling mendukung dalam menjalankan usaha.

Pemerintah Kota Palembang mendukung penuh inisiatif LSM melalui kemitraan dalam program pemberdayaan masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial, Bapak M. Ichsanul Akmal, yang menjelaskan bahwa pelatihan keterampilan kerja disertai dengan akses modal melalui kerja sama dengan lembaga keuangan mikro. Pemerintah juga menerapkan sistem pendampingan berkelanjutan untuk memastikan keterampilan yang diperoleh peserta dapat diimplementasikan dalam usaha mandiri. Dukungan sektor swasta juga dioptimalkan melalui program *Corporate Social*

*Responsibility* (CSR), yang memberikan peluang kerja dan magang kepada peserta yang dinilai siap masuk ke dunia kerja.

Berdasarkan data Dinas Sosial tahun 2024, terdapat lima jenis program pemberdayaan yang dijalankan melalui kerja sama antara pemerintah dan LSM. Program-program tersebut mencakup pelatihan keterampilan dan kewirausahaan, penyaluran bantuan modal usaha, pendampingan usaha mandiri, serta kemitraan dengan sektor swasta. Pelatihan keterampilan mencatat jumlah peserta terbanyak, yakni 250 orang, disusul pelatihan kewirausahaan dan penyaluran modal usaha. Program ini menunjukkan bahwa penguatan tidak hanya dilakukan pada tahap awal pelatihan, tetapi juga didukung oleh sistem monitoring dan evaluasi untuk menjamin keberlanjutan usaha peserta.

LSM juga menerapkan pendekatan berbasis komunitas, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Syamsul Arifin, salah satu pengurus LSM. Pendekatan ini mendorong peserta untuk membentuk kelompok usaha bersama atau koperasi guna memperkuat posisi tawar dalam menghadapi tantangan ekonomi. Selain pelatihan dan akses modal, LSM juga memberikan pendampingan psikososial khusus bagi kelompok rentan seperti perempuan kepala keluarga dan penyandang disabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan yang dilakukan mencakup aspek teknis dan mental, sehingga pemberdayaan menjadi lebih menyeluruh dan berdampak jangka panjang.

Selain penguatan dari sisi ekonomi, aspek pemahaman hak-hak dasar juga menjadi bagian penting dari strategi pemberdayaan. Aktivis HAM, Bapak Supriyadi, menekankan pentingnya edukasi tentang hak tenaga kerja, akses bantuan hukum, dan organisasi komunitas untuk memperkuat posisi sosial masyarakat marginal. Program pemberdayaan juga diarahkan untuk mengadvokasi kebijakan yang lebih inklusif, khususnya bagi perempuan dan kelompok miskin yang seringkali tertinggal dari akses pendidikan dan pekerjaan layak. Dengan membangun kesadaran hukum dan jaringan sosial, masyarakat tidak hanya menjadi lebih mandiri secara ekonomi, tetapi juga lebih sadar akan hak-hak mereka, sehingga dapat berperan aktif dalam pembangunan sosial yang adil dan setara.

### **c. Perlindungan**

Dimensi perlindungan dalam konteks pemberdayaan anak jalanan berfokus pada upaya menjamin keselamatan, kesejahteraan, dan hak-hak dasar anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan pengabaian. Anak jalanan merupakan kelompok sosial yang sangat rentan terhadap pelanggaran hak, baik secara fisik, psikologis, maupun hukum. Dalam hal ini, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berperan penting sebagai aktor perlindungan yang tidak hanya menyediakan bantuan langsung, tetapi juga mendorong perubahan sistemik melalui pendekatan struktural dan advokatif. Di Kota Palembang, LSM mengembangkan berbagai program yang terintegrasi untuk melindungi dan membina anak jalanan secara menyeluruh.

Salah satu upaya utama LSM adalah penyediaan rumah singgah sebagai tempat perlindungan sementara bagi anak jalanan. Rumah singgah tidak hanya menjadi tempat berlindung secara fisik, tetapi juga ruang pemulihan psikososial. Di dalamnya, anak-anak mendapatkan akses terhadap makanan, tempat tidur, layanan kesehatan dasar, serta kegiatan pembinaan dan keagamaan. Program pendidikan nonformal juga dijalankan untuk menjangkau anak-anak yang telah putus sekolah atau belum pernah mengenyam pendidikan formal. LSM menyediakan kelas kejar paket, bimbingan belajar, serta pelatihan keterampilan dasar sebagai bekal hidup anak-anak untuk mandiri secara ekonomi di masa mendatang.

Wawancara dengan Bapak Syamsul Arifin selaku pengurus LSM menunjukkan bahwa pendampingan anak jalanan dilakukan melalui pendekatan terintegrasi yang

melibatkan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan program magang. Pelatihan seperti menjahit, bengkel motor, dan keterampilan digital menjadi bagian penting dari pembinaan. Kolaborasi dengan perusahaan melalui program magang juga membuka peluang kerja bagi anak-anak yang telah mengikuti pelatihan. Selain itu, kerja sama dengan pemangku kepentingan lain memperkuat intervensi, menciptakan sinergi antara dunia usaha, LSM, dan pemerintah dalam memberikan perlindungan berkelanjutan.

Tidak hanya dari sisi pelayanan, dimensi perlindungan juga mencakup advokasi kebijakan untuk memperjuangkan hak-hak anak jalanan. LSM mendorong pemerintah untuk menyusun regulasi yang berpihak pada anak, seperti kemudahan akses dokumen identitas, pendidikan inklusif, dan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dan eksploitasi. Program pendampingan hukum dan pelatihan paralegal untuk remaja jalanan juga dilaksanakan untuk membangun kesadaran hukum sejak dini. Upaya ini bertujuan agar anak-anak tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga aktor aktif dalam memperjuangkan hak dan masa depannya.

Berdasarkan data LSM di Kota Palembang tahun 2024, terdapat tujuh jenis program perlindungan dan pembinaan anak jalanan yang telah menyentuh lebih dari 500 anak dan keluarga. Program ini meliputi rumah singgah, pendidikan nonformal, pelatihan keterampilan, program magang, rehabilitasi psikososial, advokasi kebijakan, dan bantuan sosial darurat. Pendekatan komprehensif ini menegaskan bahwa perlindungan anak bukan hanya soal pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga mencakup dukungan emosional, akses pendidikan, kesiapan kerja, dan pemberdayaan hukum. Dengan model kolaboratif dan berkelanjutan, LSM di Palembang berperan sebagai ujung tombak perlindungan sosial bagi anak-anak jalanan, membangun jembatan antara kebutuhan nyata mereka dan sistem pendukung yang inklusif. Christmas *et al.* (2023) menggarisbawahi pentingnya pendekatan berbasis hak dalam merancang intervensi terhadap anak jalanan agar akses terhadap keadilan dan perlindungan hukum dapat terwujud secara menyeluruh.

#### **d. Penyokongan**

Dimensi penyokongan dalam pemberdayaan anak jalanan menekankan pentingnya dukungan yang berkelanjutan bagi anak-anak yang hidup dalam kerentanan sosial. Dalam konteks ini, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kota Palembang berperan aktif memberikan berbagai bentuk dukungan yang tidak terbatas pada bantuan material, tetapi juga mencakup pendampingan psikososial, pendidikan nonformal, pelatihan keterampilan, serta advokasi identitas hukum. Penyokongan ini bertujuan untuk memberikan rasa aman, memperkuat rasa percaya diri anak, dan membuka peluang mereka untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna dan mandiri. LSM menjadi penghubung antara kebutuhan anak jalanan dengan sumber daya yang sebelumnya sulit mereka jangkau.

Wawancara dengan Syamsul Arifin selaku pengurus LSM menunjukkan bahwa lembaganya menjalankan pendekatan pemberdayaan secara menyeluruh, mulai dari penyediaan rumah singgah, pelatihan keterampilan, hingga kemitraan dengan dunia usaha untuk membuka akses magang dan kerja. Di rumah singgah, anak-anak tidak hanya mendapatkan tempat tinggal yang layak, tetapi juga kesempatan belajar membaca, menulis, serta mengikuti pelatihan seperti menjahit. Mereka didorong untuk memiliki visi hidup, membangun harapan, dan memutus siklus kehidupan jalanan yang penuh risiko. Pernyataan beliau menekankan bahwa tujuan utama penyokongan adalah membentuk kemandirian dan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak.

Aspek psikososial menjadi bagian integral dari program penyokongan. Anak-anak jalanan sering kali mengalami trauma dan keterasingan sosial akibat kekerasan,

eksploitasi, dan pengabaian. Dalam rumah singgah, LSM menyediakan layanan konseling yang dilakukan oleh relawan psikolog dan pendamping sosial, baik secara individu maupun kelompok. Bimbingan ini dilakukan secara partisipatif, disesuaikan dengan kebutuhan personal setiap anak, dan bertujuan mengembalikan fungsi sosial serta membangun kembali harga diri mereka. Testimoni dari masyarakat sekitar juga memperkuat dampak positif program ini, di mana lingkungan menjadi lebih aman dan tertib setelah anak-anak yang sebelumnya berkeliaran di jalan kini menjalani kegiatan yang lebih positif dan produktif.

Selain dukungan dari pihak internal LSM, keterlibatan masyarakat juga menjadi bukti bahwa penyokongan berjalan efektif. Kesaksian dari warga seperti Bapak Rahman menunjukkan perubahan perilaku anak jalanan setelah mengikuti program rumah singgah. Bahkan, testimoni dari anak jalanan sendiri menegaskan adanya transformasi signifikan dalam cara pandang mereka terhadap masa depan. Mereka tidak lagi merasa sendirian atau tanpa arah, melainkan mulai menata kembali hidupnya melalui pendidikan dan keterampilan yang diberikan LSM. Harapan dan semangat hidup yang muncul menjadi indikator keberhasilan dari pendekatan penyokongan yang manusiawi dan memberdayakan.

Secara keseluruhan, program penyokongan yang dijalankan oleh LSM di Kota Palembang mencakup dimensi fisik, psikologis, sosial, dan hukum. Program seperti rumah singgah, pendidikan nonformal, pelatihan keterampilan, magang, konseling psikososial, hingga advokasi dokumen identitas menandakan bahwa penyokongan tidak bersifat parsial. Seluruh intervensi didesain dengan pendekatan holistik dan sesuai dengan prinsip-prinsip pemberdayaan menurut Suharto (2005), yang menekankan pentingnya penguatan kapasitas dan partisipasi kelompok rentan. Hal ini juga sejalan dengan Konvensi Hak Anak PBB, di mana hak atas identitas, pendidikan, dan perlindungan menjadi bagian tak terpisahkan dari proses pemberdayaan. Dengan demikian, LSM berperan sebagai fasilitator perubahan yang tidak hanya memberi bantuan sesaat, tetapi juga membangun landasan kuat bagi masa depan anak-anak jalanan.

#### **e. Pemeliharaan**

Dimensi pemeliharaan dalam pemberdayaan anak jalanan menekankan pentingnya keberlanjutan dan pendampingan jangka panjang setelah intervensi awal dilakukan. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kota Palembang tidak hanya memberikan bantuan sesaat, tetapi juga mengembangkan strategi pemantauan dan intervensi secara berkala untuk memastikan anak jalanan tetap berada dalam jalur perubahan positif. Pemeliharaan menjadi langkah penting untuk menjaga keberlangsungan proses pemberdayaan dan mencegah anak-anak kembali ke kehidupan jalanan yang rentan terhadap kekerasan, eksploitasi, dan pengabaian.

LSM secara aktif melaksanakan pemantauan perkembangan anak-anak yang berada di rumah singgah, baik dari sisi fisik, psikologis, maupun sosial. Pendekatan yang dilakukan bersifat holistik, dengan menilai adaptasi anak terhadap rutinitas baru dan meninjau efektivitas kegiatan yang mereka ikuti. Dalam wawancaranya, Syamsul Arifin menyatakan bahwa pihaknya terus memotivasi anak-anak agar tetap mengikuti program serta memastikan mereka merasa nyaman dan berproses ke arah yang lebih baik. Pemantauan ini merupakan bagian penting dalam menjaga kesinambungan perubahan yang telah dimulai sejak anak-anak keluar dari kehidupan jalanan.

Kegiatan pemeliharaan juga melibatkan berbagai pihak, termasuk relawan kesehatan, psikolog, konselor, dan masyarakat sekitar. Kolaborasi ini memungkinkan adanya perhatian yang menyeluruh terhadap kebutuhan anak-anak, termasuk

pendeteksian dini terhadap gejala stres, trauma, atau niat untuk kembali ke jalan. Intervensi dilakukan jika ditemukan tanda-tanda yang mengkhawatirkan, sehingga anak-anak bisa kembali diarahkan dengan dukungan yang tepat. Pelibatan masyarakat juga terbukti efektif dalam menciptakan lingkungan sosial yang inklusif dan suportif, mendorong anak-anak untuk merasa dihargai dan diterima kembali oleh komunitas mereka.

Salah satu aspek pemeliharaan yang penting adalah pelatihan keterampilan yang berkelanjutan dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Anak-anak yang mengikuti pelatihan menjahit, perbaikan motor, hingga keterampilan digital tidak hanya mendapatkan keahlian teknis, tetapi juga rasa percaya diri serta rutinitas produktif yang mampu memperkuat ketahanan mereka dari tekanan sosial. Dengan pemantauan terstruktur terhadap hasil pelatihan dan kemajuan psikososial, LSM dapat mengukur sejauh mana proses pemberdayaan berhasil menciptakan perubahan yang berdampak bagi masa depan anak-anak.

Berdasarkan data tahun 2025, hasil dari pemantauan dan intervensi LSM menunjukkan bukti perubahan signifikan. Anak-anak memperoleh pemeriksaan kesehatan rutin, mengalami penurunan gejala trauma, tetap mengikuti program tanpa kembali ke jalan, serta berhasil menjalin hubungan sosial yang positif dengan masyarakat. Program pelatihan juga membekali mereka dengan keterampilan nyata untuk menata masa depan. Semua ini mencerminkan bahwa dimensi pemeliharaan tidak hanya menjaga stabilitas kondisi anak jalanan, tetapi juga memperkuat proses transisi mereka menuju kehidupan yang lebih bermartabat dan produktif secara berkelanjutan.

Dalam implementasi program pemberdayaan anak jalanan di Kota Palembang, terdapat sejumlah faktor pendukung yang memperkuat efektivitas intervensi yang dilakukan. Kerja sama yang erat antara pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan sektor swasta menjadi landasan utama dalam penyediaan fasilitas, pelatihan, serta pendampingan anak-anak jalanan. Dinas Sosial Kota Palembang, melalui berbagai programnya, menunjukkan komitmen terhadap penguatan kapasitas dan pemenuhan hak-hak dasar anak. Hamid (2018) menyatakan bahwa manajemen pemerintahan daerah yang efektif harus ditopang oleh koordinasi antarinstansi dan pelibatan stakeholder lokal secara aktif. LSM juga turut berperan penting dengan menghadirkan pendidikan nonformal, rumah singgah, hingga pelatihan keterampilan. Faktor lain yang tak kalah penting adalah keberadaan komunitas lokal yang peduli, serta jaringan relawan dan mitra usaha yang bersedia membuka ruang magang dan kerja bagi anak-anak yang telah menjalani pelatihan.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya, program pemberdayaan ini juga menghadapi berbagai faktor penghambat. Salah satu kendala utama adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran mereka dalam mendukung proses rehabilitasi anak jalanan. Stigma negatif yang melekat membuat sebagian warga memandang anak jalanan sebagai beban atau ancaman keamanan, bukan sebagai individu yang memiliki potensi untuk berubah. Selain itu, keterbatasan dana, sumber daya manusia, serta kendala administratif seperti ketiadaan dokumen identitas (KTP, KK, atau akta kelahiran) menjadi penghalang bagi anak-anak ini untuk mengakses bantuan sosial atau memasuki dunia kerja formal. Keterbatasan dalam pendampingan jangka panjang juga membuat sebagian anak kembali ke jalan karena kehilangan arah pasca pelatihan.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh LSM dan pihak terkait untuk mengatasi tantangan tersebut. Strategi yang diterapkan mencakup pendekatan berbasis komunitas dengan mengedukasi masyarakat sekitar melalui sosialisasi yang intensif. Kegiatan ini bertujuan mengubah persepsi masyarakat dan menumbuhkan empati, agar anak jalanan dapat diterima

kembali dalam lingkungan sosial. Di sisi lain, LSM juga menjalin kerja sama dengan instansi kependudukan guna membantu anak-anak mengurus dokumen identitas resmi. Langkah ini sangat penting dalam membuka akses terhadap program sosial, pendidikan formal, serta peluang kerja yang lebih luas dan legal.

Selain aspek administratif dan sosial, pendekatan internal pun terus ditingkatkan. Salah satu bentuknya adalah sistem pemantauan dan intervensi lanjutan setelah anak-anak menyelesaikan pelatihan. LSM membentuk kelompok pendampingan yang terdiri dari relawan, konselor, serta alumni program pemberdayaan yang telah lebih dulu berhasil. Kelompok ini berperan penting dalam membantu anak-anak tetap berada di jalur pemberdayaan dan mencegah mereka kembali ke kehidupan jalanan. Bimbingan yang konsisten dan lingkungan yang suportif menjadi faktor penentu dalam transisi anak-anak menuju kehidupan yang lebih mandiri.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat berbagai hambatan struktural dan kultural, sinergi antaraktor, dukungan kebijakan, serta inovasi pendekatan lapangan menjadi kunci dalam memperkuat pemberdayaan anak jalanan. Keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan oleh bantuan material, tetapi juga oleh keberlanjutan bimbingan sosial, pemulihan psikologis, dan keterlibatan aktif masyarakat sebagai lingkungan pendukung. Dengan strategi yang menyeluruh dan responsif, pemberdayaan anak jalanan di Kota Palembang dapat terus berkembang menjadi solusi jangka panjang yang tidak hanya menyentuh individu, tetapi juga sistem sosial secara lebih luas.

### **3.2. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Temuan penelitian ini mengungkap bahwa pemberdayaan anak jalanan yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kota Palembang mencakup lima dimensi sebagaimana dikemukakan oleh Suharto (2010), yaitu pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan. Pendekatan yang dilakukan tidak hanya bersifat karitatif, tetapi juga transformatif, dengan menasar perubahan kapasitas individu anak jalanan melalui pendidikan nonformal, pelatihan keterampilan, hingga pendampingan psikososial dan advokasi hukum. Hal ini sejalan dengan temuan Rahman (2024) yang menekankan pentingnya pendekatan berbasis komunitas dalam upaya pemberdayaan, meskipun penelitian ini memberikan cakupan yang lebih luas pada dimensi perlindungan hukum dan pendampingan pasca pelatihan.

Sama halnya dengan temuan Pratama dkk. (2025), penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan keberfungsian sosial anak jalanan membutuhkan intervensi lintas dimensi yang melibatkan tidak hanya LSM, tetapi juga masyarakat, sektor swasta, dan pemerintah. Namun, berbeda dari penelitian tersebut yang menekankan aspek internal keluarga dan komunitas sebagai faktor utama, penelitian ini lebih menekankan peran struktur kelembagaan dan model kemitraan antara LSM dengan instansi pemerintah dan dunia usaha, yang terbukti efektif dalam menciptakan akses magang, pekerjaan, serta modal usaha. Temuan ini memperluas cakupan praktik baik dalam pemberdayaan anak jalanan dengan mendorong integrasi lintas sektor secara aktif.

Berbeda dengan Babuno dkk. (2024) yang menyoroti dukungan lembaga donor internasional sebagai faktor dominan dalam keberhasilan pemberdayaan, penelitian ini justru menemukan bahwa kolaborasi lokal menjadi lebih signifikan dan berkelanjutan dalam konteks Kota Palembang. Ketergantungan terhadap bantuan luar justru tidak dominan; LSM setempat mampu memobilisasi sumber daya lokal dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa kemandirian dan keberlanjutan program lebih mudah dicapai melalui penguatan basis lokal dan pemberdayaan berbasis kebutuhan kontekstual.

Lebih lanjut, hasil penelitian ini memperkuat temuan Daini & Arif (2023) yang menegaskan pentingnya pemeliharaan dalam siklus pemberdayaan, namun memberikan tambahan perspektif berupa pembentukan sistem pemantauan dan kelompok pendampingan pasca pelatihan. Inovasi ini menjadi salah satu pembeda utama dari penelitian sebelumnya, karena menekankan pentingnya jangka panjang dan keberlanjutan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menegaskan relevansi model pemberdayaan yang komprehensif, tetapi juga mengusulkan praktik-praktik baru yang adaptif terhadap dinamika sosial di perkotaan, khususnya bagi kelompok anak jalanan di Kota Palembang.

### **3.3. Diskusi Temuan Menarik Lainnya**

Salah satu temuan menarik dari penelitian ini adalah pentingnya kerja sama lintas sektor sebagai faktor pendukung utama dalam pelaksanaan program pemberdayaan anak jalanan. Kolaborasi antara LSM, pemerintah, dunia usaha, dan komunitas lokal terbukti memperluas cakupan intervensi, baik dari segi akses pelatihan, fasilitas rumah singgah, maupun penyaluran kerja dan bantuan sosial. Pendekatan multipihak ini menunjukkan bahwa pemberdayaan tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan sinergi berkelanjutan untuk menciptakan perubahan sosial yang signifikan.

Temuan lain yang cukup menonjol adalah rendahnya partisipasi masyarakat umum dalam mendukung pemberdayaan anak jalanan. Masih terdapat stigma sosial yang melekat kuat terhadap anak jalanan, yang dianggap sebagai gangguan atau ancaman ketertiban lingkungan. Stigma ini menyebabkan resistensi terhadap program seperti rumah singgah atau pelatihan yang dilakukan di lingkungan warga. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya inklusi sosial menjadi penghambat kunci dalam reintegrasi anak jalanan ke dalam komunitas.

Selain itu, keterbatasan dokumen kependudukan seperti KTP, kartu keluarga, atau akta kelahiran menjadi kendala administratif serius bagi anak jalanan untuk mengakses bantuan sosial, pendidikan formal, maupun pekerjaan legal. Banyak dari mereka yang tidak tercatat secara resmi di sistem kependudukan, sehingga kesulitan dalam memenuhi syarat administratif berbagai program pemerintah. Kondisi ini menunjukkan perlunya integrasi layanan hukum dan kependudukan ke dalam model pemberdayaan sosial bagi kelompok rentan.

Temuan menarik lainnya adalah pentingnya pendampingan pasca-pelatihan sebagai faktor penentu keberhasilan program pemberdayaan. Banyak anak jalanan yang kembali ke jalanan karena tidak adanya bimbingan lanjutan setelah pelatihan selesai. Penelitian Lima *et al.* (2021) juga menunjukkan bahwa pengalaman hidup di jalan sangat bervariasi antar individu, sehingga pendekatan personal dan berpusat pada kebutuhan anak menjadi krusial dalam intervensi sosial. LSM yang menerapkan sistem monitoring dan kelompok pendampingan terbukti mampu mempertahankan keberlanjutan intervensi dan mencegah anak-anak kembali ke pola hidup lama. Hal ini mengindikasikan bahwa aspek pemeliharaan sosial dan psikologis harus menjadi perhatian utama dalam strategi pemberdayaan jangka panjang.

## **IV. KESIMPULAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) memiliki peran yang signifikan dalam upaya pemberdayaan anak jalanan di Kota Palembang. Melalui lima dimensi pemberdayaan menurut Suharto (2010), pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan, LSM mampu menyediakan layanan yang menyentuh berbagai aspek kebutuhan anak jalanan, mulai dari pendidikan nonformal, pelatihan keterampilan, konseling psikososial, hingga pendampingan hukum dan advokasi kebijakan. Program-program tersebut bertujuan tidak hanya untuk mengatasi kondisi kerentanan anak jalanan, tetapi juga untuk membangun kemandirian dan kesadaran akan hak-hak mereka sebagai warga negara.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pemberdayaan anak jalanan sangat ditentukan oleh kerja sama antara berbagai pihak, seperti pemerintah, LSM, sektor swasta, dan masyarakat. Faktor pendukung seperti dukungan kebijakan, kemitraan CSR, serta keterlibatan komunitas lokal sangat berkontribusi terhadap keberlangsungan program. Namun demikian, sejumlah hambatan juga ditemukan, antara lain rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan dokumen kependudukan anak jalanan, serta kurangnya pendampingan pasca pelatihan yang mengakibatkan sebagian anak kembali ke jalanan.

Dengan demikian, pemberdayaan anak jalanan tidak dapat dilakukan secara parsial atau jangka pendek. Dibutuhkan pendekatan yang menyeluruh, kolaboratif, dan berkelanjutan, baik dari sisi penyediaan layanan dasar, pembentukan karakter, maupun integrasi sosial dan ekonomi. LSM sebagai aktor non-negara telah membuktikan peran vitalnya dalam menjawab kompleksitas persoalan anak jalanan, namun untuk mencapai dampak yang lebih luas dan sistemik, keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan menjadi sangat penting.

**Keterbatasan Penelitian:** Penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu dicermati, terutama terkait ruang lingkup wilayah yang hanya difokuskan pada Kota Palembang sehingga hasil temuan belum dapat digeneralisasikan secara luas ke daerah lain dengan karakteristik sosial yang berbeda. Selain itu, metode pengumpulan data yang bersifat kualitatif melalui wawancara dan observasi sangat bergantung pada keterbukaan informan dan interpretasi peneliti, sehingga berpotensi menimbulkan bias subjektif. Penelitian ini juga belum mengevaluasi dampak jangka panjang dari program pemberdayaan yang dilakukan oleh LSM, sehingga efektivitas keberlanjutan program dalam mengubah kehidupan anak jalanan secara menyeluruh belum sepenuhnya terukur.

**Arah Masa Depan Penelitian:** Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan wilayah studi agar dapat membandingkan efektivitas program pemberdayaan anak jalanan di berbagai kota atau provinsi, sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif dan generalisatif. Selain itu, penting pula untuk mengembangkan pendekatan metodologis yang bersifat kuantitatif maupun campuran (*mixed methods*) guna mengukur dampak jangka panjang dari program pemberdayaan terhadap perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis anak jalanan secara lebih terukur. Penelitian masa depan juga disarankan untuk menggali lebih dalam keterlibatan pihak-pihak lain seperti dunia usaha, lembaga pendidikan, serta tokoh masyarakat dalam memperkuat ekosistem pemberdayaan yang inklusif dan berkelanjutan. Pendekatan kolaboratif lintas sektor ini akan memperkaya pemahaman tentang dinamika sosial yang memengaruhi keberhasilan program serta memperkuat intervensi kebijakan berbasis bukti.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Dinas Sosial Kota Palembang, Kecamatan Ilir Barat Dua, serta seluruh informan yang telah memberikan dukungan, informasi, dan kerja sama selama proses penelitian. Penghargaan juga ditujukan kepada semua pihak yang turut membantu secara langsung maupun tidak langsung. Semoga penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan pemberdayaan anak jalanan di Kota Palembang.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, M., Syamsuddin, R., & Fuady, M. I. N. (2023). Penerapan Regulasi Tentang Pekerja Sosial Terhadap Lembaga Pekerja Sosial di Kota Makassar. *Alauddin Law Development Journal*, 5(1): 157–166. <https://doi.org/10.24252/aldev.v5i1.21313>
- Ariska, L., Alamsyah & Junaidi. (2021). Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Anak Terlantar di Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir. *Jurnal Dinamika Manajemen dan Kebijakan Publik (DMKP)*, 1(1): 10–24. Palembang. <https://doi.org/10.33369/dinamikapublik.v1i1.19211>
- Ayun, L. F. S. Q., Purnomo, A., & Kurniawan, B. (2023). Partisipasi Volunteer pada Lembaga Swadaya Masyarakat (Studi Kasus Volunteer LPAN GRIYA Baca Malang). *Jurnal Integrasi Dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial (JIHI3S)*, 3(4): 436–451. <https://doi.org/10.17977/um063v3i4p436-451>
- Babuno, R. N., Subandi, Y., & Wiratma, H. D. (2024). Peran Think Volunteer Terhadap Yayasan Rumah Impian Indonesia (Dreamhouse) dalam Upaya Pemenuhan Hak Anak Jalanan di Yogyakarta Tahun 2022–2023. *Innovative: Journal of Science Research*, 4: 2803–2814. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/14970>
- Bhukuth, A., & Jerome, B. (2015). Children of the street: Why are they in the street? How do they live? *Economics and Sociology*, 8(4), 134–148. <https://doi.org/10.14254/2071-789X.2015/8-4/10>
- Bimantara, I., & Dharmawan, A. (2021). Representasi Kelas Sosial dalam Film Gundala (Analisis Semiotika Model Peirce). *Commercium*, 4(2), 56–69. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/Commercium/article/view/41592>
- Christmas, S. K., Anisyaputri, & Mahoro, J. C. G. (2023). Enhancing access to justice for street children through a rights-based perspective on sustainable development goals. *Journal of Judicial Review*, 25(2), 175. <https://doi.org/10.37253/jjr.v25i2.8498>
- Daini, N. K. P. D., & Arif, L. (2023). Peran Komunitas Omah Dhuafa Dalam Pemberdayaan Anak Jalanan di Kabupaten Gresik. *Journal Publicuho*, 6(3), 779–788. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.186>
- Hamdi, M. (2014). *Kebijakan Publik: Proses, Analisis dan Partisipasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Hamid, H. (2018). *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Sumedang: IPDN.
- Lima, R. F. F., Raffaelli, M., de Morais, N. A., Santana, J. P., & Koller, S. H. (2021). Capturing the heterogeneity of life on the streets: A person-centered analysis of street histories and social connections of youth. *Journal of Adolescence*, 93, 20–30. <https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2021.10.004>
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2018). *Modul Perkuliahan Metodologi Penelitian Sosial*. Sumedang: Fakultas Politik Pemerintahan IPDN.
- Pratama, Y. A., Nastia, G. I. P., & Isnajati, L. M. (2025). Model Strategi Penguatan Keberfungsian Sosial Anak Jalanan: Studi di Kelurahan Cikutra Kota Bandung. *Jurnal Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial*, 6(1), 1-24. <https://doi.org/10.52423/jkps.v6i1.107>
- Putri, K. E. S., Wahyuni, M. R., Hasibuan, W. F., & Mustika, D. (2024). Evaluasi dan Penilaian yang Adil dalam Konteks Pendidikan Inklusi. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(6): 143–155. <https://media.neliti.com/media/publications/124205-ID-evaluasi-pendidikan-inklusif-bagi-anak-b.pdf>
- Qomariyah, N., Jihan, D. A. N., Tamara, K., & Ismanto, K. (2023). Analisis Peluang dan Tantangan Adanya Bonus Demografi di Tahun 2045 terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Sahmiyya*, 2(1): 180–186. <https://e-journal.uingsdur.ac.id/sahmiyya/article/view/889>

- Rahmadana, M., Ridwan, & Alisalman, M. (2023). Analisis Pemberdayaan Perempuan Berbasis UMKM dalam Meningkatkan Minat Usaha Keluarga oleh Komunitas Mompreneurs di Kota Samarinda. *Learning Society: Jurnal CSR, Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 4(2), 341–350. <https://doi.org/10.30872/lis.v4i2.3494>
- Rahman, A. N. (2024) *Pemberdayaan Anak Jalanan Melalui Program Pendidikan di Yayasan Sahabat Anak Kota Tua, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat*. (Doctoral dissertation, Universitas Nasional). <http://repository.unas.ac.id/id/eprint/12300>
- Rempe, O., Ilyas, M. Y., Shafwan, A. F., Syukur, M., & Arifin, I. (2023). Meninjau Tantangan dan Hambatan dalam Pendidikan Anak Jalanan: Studi Kasus Pada Anak-Anak Jalanan di Kota Makassar. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 4(05), 448–458. <https://doi.org/10.59141/japendi.v4i05.1761>
- Santoso, G., Karim, A. Z., Maftuh, B., Sapriya, & Murod, M. (2023). Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi melalui Kajian Filosofis Pembukaan UUD 1945 Indonesia Abad 21.” *Jurnal Pendidikan Transformatif (JUPETRA)*, 2(1): 297–311. <https://jupetra.org/index.php/jpt/article/view/137>
- Simangunsong, F. (2019). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. (2010). *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis untuk Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Yusuf, M. A., & Tsagem, S. Y. (2022). Empowering street children in Nigeria: Non-formal education and counselling potentials. *Sokoto Educational Review*, 21(1). [https://www.researchgate.net/publication/366920870\\_EMPOWERING\\_STREET\\_CHILDREN\\_IN\\_NIGERIA\\_NON-FORMAL\\_EDUCATION\\_AND\\_COUNSELLING\\_POTENTIALS](https://www.researchgate.net/publication/366920870_EMPOWERING_STREET_CHILDREN_IN_NIGERIA_NON-FORMAL_EDUCATION_AND_COUNSELLING_POTENTIALS)

